

PENGARUH PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI



NAMA : Fauziah

NIM : 22 2011 287

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

PENGARUH PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



NAMA : Fauziah
NIM : 22 2011 287

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah

Nim : 22 2011 287

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Januari 2016

Yang membuat Pernyataan,



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nama : Fauziah

NIM : 22.2011.287

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing,

Hj. Ida Zuraidah, S.E, Ak., M.Si
NIDN: 0224017201

Mengetahui,
Dekan
Ir.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghosali, S.E, Ak., M.Si
NIDN: 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu.
- ❖ Kenikmatan terbaik di dalam hidup adalah melakukan apa yang orang katakan kamu tidak bisa lakukan.

(Fauziah)

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Ayahandaku (M. Thompson) dan Ibundaku (Masnun)
- My Twins (Maimunah S.E) dan Adikku (M. Rajab)
- Sahabat-sahabat Perjuanganku
- Posko 143 (KKN)
- Almematerku



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda (M. Thomspion AB) dan ibunda (Masnun) yang telah memberikan dukungan moril, materil maupun doa kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Hj. Ida Juraidah S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abid Djazuli S.E, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,Ak, M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Pembimbing Akademik, dan ibu Welly, S.E.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala Dinas beserta staf dan pegawai Dinas Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan.

6. Sahabat, teman-teman (Dwi Puspita Sari, Yuni Ambarsari, Rizki Sakinah, Rizka Sakinah, Lina Wati, Melda Novita, Puji Rahayu, Yoan, Trilia, Rahayu, Swistri, dll) dan rekan-rekan KKN Posko 143 (Umi, Windya, Renggi, Imam, Niko) serta semua pihak yang telah membantu saya, terima kasih atas bantuan, motivasi dan kebersamaanya.

Akhirul kalam penulis mengucapkan terima kasih yang seiklas-iklasnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya guna menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, sebagai tambahan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu refrensi dalam penyusunan skripsi berikutnya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2015

Peneliti

Fauziah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PEMBAHASAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	12
1. Pajak Daerah	12
a. Pengertian Pajak Daerah	12
b. Fungsi Pajak	13

c. Unsur-unsur Pajak	14
d. Kriteria Umum Pajak	15
e. Jenis-jenis Pajak Provinsi	16
2. Pajak Kendaraan di atas Air	17
a. Pengertian Pajak Kendaraan di atas Air	17
3. Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air	18
a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air	18
b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air	18
4. Pendapatan Asli Daerah	18
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	20
C. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Operasional Variabel	24
D. Data yang Diperlukan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V SIMPUL DAN SARAN	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3
Tabel I.2	Target dan Realisasi Pajak PKAA dan BBN-KAA	5
Tabel II.1	Daftar Penelitian Sebelumnya	11
Tabel III.1	Operasional Variabel	24
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKAA Tahun 2012	45
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan PKAA Tahun 2013	46
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Penerimaan PKAA Tahun 2014	47
Tabel IV.4	Target dan Realisasi Penerimaan BBN-KAA Tahun 2012	48
Tabel IV.5	Target dan Realisasi Penerimaan BBN-KAA Tahun 2013	49
Tabel IV.6	Target dan Realisasi Penerimaan BBN-KAA Tahun 2014	50
Tabel IV.7	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2012	51
Tabel IV.8	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2013	52
Tabel IV.9	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014	53
Tabel IV.4	Hasil Uji Normalitas	55
Tabel IV.5	Uji Autokorelasi	58
Tabel IV.6	Uji Multikolinearitas	59
Tabel IV.7	Kolerasi (r) dan Koefisien Determinasi (R Square)	60
Tabel IV.8	Regresi Berganda	61
Tabel IV.9	Uji f	64
Tabel IV.10	Uji t	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Target dan Realisasi Penerimaan PATDA 2010-2014	75
Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian	76
Lampiran 3 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an	77
Lampiran 4 : Sertifikat TOEFL	78
Lampiran 5 : Sertifikat KKN	79
Lampiran 6 : Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi	80
Lampiran 7 : Biodata Penulis	81

Abstrak

Fauziah/222011287/2015/Pengaruh Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan / akuntansi Sektir Publik

Rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama di Atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah secara Simultan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ? dan bagaimanakah Pengaruh Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah secara Parsial pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ? Tujuannya untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah secara Simultan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah secara Parsial pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bagi DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan dab bagi almamater.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, dengan tempat penelitian di Dinas Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di jalan POM IX Kampus Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air, dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawan cara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kata Kunci: pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan di atas air dan pendapatan asli daerah

ABSTRACT

Fauziah / 222011287/ 2015/ *The Influence of the Water Vehicle's Tax and Vehicle Transfer Tax toward Local Revenue on South Sumatera Region Revenue./ Accounting Public Sector.*

The problem of this study was how the influence of the water vehicle's tax and vehicle transfer tax toward local revenue simultaneously on Department of Revenue, South Sumatera Province and how the influence of the water vehicle's tax and vehicle transfer tax toward local revenue partially on Department of Revenue, South Sumatera Province. The objective of this study was to find out the influence of the water vehicle's tax and vehicle transfer tax toward local revenue, both simultaneously and partially on Department of Revenue, South Sumatera Province.

This study was an associative study. It was conducted at POM IX Kampus Palembang. The variable of the study were water vehicle's tax, vehicle transfer tax, and local revenue. The data used in this study was secondary data. The techniques for collecting the data were interview and documentation. The technique for analyzing the data used in this study was quantitative analysis, which to know the influence of the water vehicle's tax and vehicle transfer tax toward local revenue.

The results showed that there was no significant influence between the water vehicle's tax and vehicle transfer tax toward local revenue.

Key words: water vehicle's tax, vehicle transfer tax, and local revenue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengumuman melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensialnya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan daerah. Kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan biaya, sarana dan

prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan tersebut. Sebagai kosekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah mulai dari kepegawaian, perencanaan, pengawasan, pajak, dan pendapatan lain-lainnya atau retribusi daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diberi kewenangan atas pelaksanaan dan pengaturan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun semakin berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa hasil realisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah untuk meningkatkan otonomi daerah didalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada Tabel 1 berikut dapat dilihat seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai data pendukung, berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel I.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2010-2014**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Percentase Pencapaian
	Target	Realisasi	
2010	1.363.164.448.550,00	1.369.935.856.700,26	100,45
2011	1.687.295.615.400,00	1.849.119.912.016,18	109,59
2012	1.907.709.081.676,00	2.001.714.583.551,61	104,92
2013	2.214.420.245.000,00	2.021.696.787.275,10	91,29
2014	2.595.724.088.303,00	2.407.878.390.923,86	92,76

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010, 2011 dan 2012. Hal ini disebabkan karena pajak daerah menurun, maka pendapatan asli daerahnya juga menurun.

Provinsi sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang ada dinegara Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Pemerintah Daerah Sumatera selatan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapital sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan. Berdasarkan APBD Sumatera selatan, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah , serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah Provinsi sumatera selatan yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Untuk Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih dianggap belum potensial di Sumatera Selatan.

Padahal Daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menggunakan sarana transportasi di air. mengingat Sumatera Selatan memiliki sungai yang cukup besar yakni, sungai musi.

Berikut ini Tabel penerimaan Pajak Kendaraan di atas air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) Sumatera Selatan tahun 2010 sampai 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PKAA dan BBN-KAA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun	Jenis Pajak	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Pencapaian
2010	PKAA	210.831.900,00	199.076.950,00	94,42
	BBN-KAA	20.000.000,00	18.420.400,00	92,10
2011	PKAA	211.000.000,00	191.950.125,00	90,97
	BBN-KAA	20.000.000,00	24.011.100,00	120,05
2012	PKAA	211.000.000,00	219.692.550,00	104,11
	BBN-KAA	20.000.000,00	18.167.550,00	90,83
2013	PKAA	211.000.000,00	202.550.725,00	95,99
	BBN-KAA	30.000.000,00	24.589.155,00	81,96
2014	PKAA	211.000.000,00	188.799.250,00	89,47
	BBN-KAA	30.000.000,00	25.464.900,00	84,88

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel 2 yang di peroleh oleh peneliti, menunjukkan bahwa perbandingan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar 89,47% untuk Pajak Kendaraan di atas Air dan 84,88% untuk Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air. Dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA)

merupakan sumber pendapatan asli daerah yang masih belum berpotensi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi dari kedua pajak tersebut yang diberikan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Simultan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Simultan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan diharapkan dapat menambah wawasan penelitian.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan yang mungkin akan bermanfaat bagi instansi.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Dwi (2013) Yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT Serpong-DPKAB Provinsi Banten. Rumusan masalah bagimana pengaruh penerimaan pajak kendaraan di atas air Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Serpong-DPKAB Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak kendaraan di atas air Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada UPT Serpong-DPKAB Provinsi Banten.

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dinas pendapatan asli daerah pada UPT Serpong-DPKAB Provinsi Banten. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dampak pajak kendaraan di atas air Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sendhy (2013) yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dinas pendapatan asli daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan Kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air yang berpengaruh cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk perbandingan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari persamaan dan perbedaanya yang ditampilkan dalam menggunakan tabel.

Tabel II.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Judul, Tahun, dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Peneliti
1	(Dwi, 2013) Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT Serpong-DPKAB Provinsi Banten.	Dengan menggunakan Koefisien determinasi diperoleh nilai 62,70 % dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan di atas Air memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD)	Perbedaan: Pada judul ini membahas tentang Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap PAD sedangkan judul yang saya buat Tentang Pegaruh Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas air dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan terhadap PAD Persamaan: Sama-sama membahas tentang pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap PAD
2	(Sendhy, 2014) Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air yang berpengaruh Cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Perbedaan: Pada judul ini hanya membahas tentang Pengaruh Kontribusi PKB, BBN-KB dan PKAA terhadap PAD sedangkan judul yang saya buat tentang Pengaruh Kontribusi PKAA dan BBN-KAA Terhadap PAD Persamaan: Sama-sama membahas tentang Pajak Kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah

Sumber: Peneliti, 2015

B. Landasan Teori

1. Pajak daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama.

Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009 :1)
- 2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2008 :4).

- 3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Fungsi – fungsi pajak terdiri dari (Harry, 2010 :10)

- 1) Revenue (penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi budgetair yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- 2) Redistribution (Pemerataan)

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

- 3) Repricing (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama dengan fungsi Regulerent (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk

mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibanding ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

4) Representation (Legalitas Pemerintah)

Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi keselamatan manusia.

c. Unsur-unsur Pajak

Beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pajak terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak merupakan Iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah/negara.
- 2) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 3) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan sehingga dapat dipaksakan.
- 5) Pajak dipungut tanpa ada kontra prestasi yang secara langsung dapat dipungut.

- 6) Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara.
- 7) Pajak sebagai sumber keuangan negara dan berfungsi juga sebagai pengatur.
- 8) Bagi yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk.
- 9) Pajak yang telah dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah khususnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Kriteria Umum Pajak

Perpajakan harus memenuhi beberapa kriteria umum yaitu :

- 1) Kecukupan dan elastisitas, yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil tersebut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.
- 2) Keadilan, dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus adil secara horisontal maupun vertikal, adil dari tempat ke tempat.
- 3) Kelayakan Administrasi, dimana berbagai jenis pajak sangat berbeda mengenai jumlah, integritas dan keputusan yang

diperlukan dalam pengadministrasinya. Dalam penerapan pajak diperlukan administrasi yang mudah dan sederhana.

- 4) Kesepakatan politis, pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat .
- 5) Distorsi ekonomi, pajak hendaknya mendorong (sekurang kurangnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, karena pengenaan pajak akan menjadi tambahan beban masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

e. Jenis – jenis Pajak Provinsi

Pajak daerah provinsi terdiri atas (Abdul, 2008 : 67):

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atas pengusaha kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

2) Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

Adalah pajak atas penyerahan hal milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua hak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan kedalam usaha.

3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaat Air Bawah Tanah atau Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

2. Pajak Kendaraan di atas Air

a. Pengertian Pajak Kendaraan di atas Air

Pajak Kendaraan di atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air. Kendaraan di atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air. Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk menangkap ikan
- 2) Untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan
- 3) Untuk pesiar, olahraga dan rekreasi

3. Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

- (1) Tarif BBN-KAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5%
- (2) Tarif BBN-KAA atas penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%
- (3) Tarif BBN-KAA atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marihot, 2008 :14).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain – lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jas giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah)

Berdasarkan kententuan maka PAD dapat disimpulkan sebagai:

- (a) PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya.
- (b) Di dalam mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pengumutan pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Undang – undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan tentang pendapatan asli yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah memiliki sifat-sifat yaitu pelaksaananya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan – persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk tidak mau membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal – hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Adalah penerimaan berupa bagian laba bersih badan usaha milik daerah yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, bangunan dari laba bersih perusahaan daerah.

4) Penerimaan dari Dinas – Dinas Daerah

Adalah penerimaan daerah dari dinas – dinas yang tidak merupakan penerimaan: penerimaan dari dinas pertanian, penerimaan dari dinas pertenakan, penerimaan dari dinas – dinas kesehatan dan lain – lain.

5) Penerimaan Lain – lain

Adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan milik usaha daerah, dan penerimaan dinas – dinas. Misalnya: hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang bekas, cicilan kendaraan bermotor beroda empat dan beroda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan lain – lain (Marihot, 2010 : 11).

C. Hipotesis

H_1 : Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

H_2 : Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H_3 : Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilihat dari tingkat eksplanasinya terdiri dari (Sugiono, 2009 : 53):

1. Penelitian Deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.
2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Asosiatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan POM IX Kampus Palembang Kode Pos 30137 Telepon : 0711-310633 E-mail : pdf@dispendaprovsumsel.co.cc

C. Operasional Variabel

**Tabel III. 1
Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Pajak Kendaraan Di Atas Air (PKAA) X1	Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang digunakan di atas air.	Realisas Pajak Kendaraan di Atas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (BBN-KAA) X2	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Y	Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undang	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah

Sumber: Peneliti 2015

D. Data yang Diperlukan

Data penelitian berdasarkan sumber dapat dikelompokan menjadi (Bambang, 2012 : 146):

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, seperti wawancara, atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder berupa catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip:

- a) Data dan Target Realisasi Pendapatan Asli daerah tahun 2010 – 2014
- b) Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air tahun 2010 – 2014

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari (Sugiyono, 2013 : 156-168):

1. Interview (Wawancara)

Interview teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Dokumentasi yaitu mencatat atau mengcopy data dan target realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2014.

- b) Wawancara yaitu pertanyaan lisan kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah dan karyawannya mengenai jumlah data target dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2010 – 2014.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu (Sugiyono, 2012 :13-14):

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang digunakan.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Teknik Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diuji perlu diketahui apakah data melanggar asumsi dasar seperti *normalitas*, *autokorelasi*, *heterokedastisitas*, serta *multikinearitas*. Parameter yang diestimasi dengan salah satu metode diatas kemudian akan di uji secara statistik untuk melihat apakah hipotesis dapat diterima atau di tolak. Cara pengujian yang dapat dilakukan adalah dengan uji nilai t, uji nilai f dan *adjusted R-squared*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap estimasi ekonomi harus di bersihkan dari penyimpangan terhadap asumsi dasar dan dalam studi ini ketiga masalah tersebut akan dideteksi untuk setiap persamaan. Untuk memenuhi asumsi klasik, maka model persamaan regresi diatas terlebih dahulu akan dilakukan pengujian-pengujian:

1) Uji normalitas

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*), dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *One Sample*

Kolmogorov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

- Jika nilai probabilitas (*kolmogorov-smirnov*) > taraf signifikansi 5%, maka data terdistribusi dengan normal
- Jika nilai probabilitas (*kolmogorov-smirnov*) < taraf signifikansi 5%, maka data tidak terdistribusi dengan normal

2) Uji Heteroskedastisitas

(Anwar, 2011 :141-142) gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila nilai absolut resedual diregresi dengan variabel bebas, ternyata untuk variabel X_1 nilai probabilitas lebih besar dari pada ($\alpha = 0,05$) artinya variabel bebas motivasi tidak signifikan dengan variabel absolute demikian juga untuk variabel lainnya. Karena itu model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi dideteksi dengan melakukan uji *Durbin Watson (d)*. Hasil perhitungan *Durbin Watson (d)* dibandingkan dengan d_{tabel} pada $\alpha = 0,05$, Tabel d memiliki

dua nilai, yaitu nilai batas d_u dan nilai batas bawah d_l untuk berbagai nilai n dan k. Jika *Durbin Watson* (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Multikolinearitas

Pendeteksiannya terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat VIF dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 terdapat gejala multikolinearitas sebaliknya jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

b. Analisis Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R Square)

Korelasi adalah koefisien yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut dapat secara korelasional dan dapat juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab-akibat maka korelasi tersebut dikatakan korelasional, artinya sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kausal, artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat.

Koefisien Determinasi adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan, artinya penyebab perubahan pada variabel Y

disebabkan oleh variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik atau turunnya variabel lain (variabel Y).

c. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perlunasan dari regresi linier sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama di atas Air. Dengan demikian regresi linie berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_a X_a + e$$

Maka kesimpulan penelitian ini digunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Kendaraan di atas Air

X_2 = Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

a = Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi variabel X

e = error / Residual

d. Uji Hipotesis

1) Uji F (uji sistematis)

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum (Sugiyono, 2008 : 264).

Uji F digunakan untuk menguji variabel bebas (Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air) secara bersama-sama (serentak) terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

H_a : adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

Kriteria penilaian:

- (1) Jika $\text{sig F} / < \alpha(0,05)$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ berarti ada pengaruh yang signifikan. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- (2) Jika $\text{sig F} / > \alpha(0,05)$ atau $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 3) Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual alam menerangkan variasi variabel terikat (Sugiyono, 2008 :224).

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

H_a : adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sematera selatan.

Kriteria penilaian:

- (1) Jika $\text{sig } t > \alpha (0,05)$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti ada pengaruh yang signifikan. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- (2) Jika $\text{sig } t > \alpha(0,05)$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sejalan dengan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas daerah yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 1973 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9/Perdass/1973/974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan diundangkan berdasarkan Pasal 69 G.S. no.5 tahun 1974 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 tanggal 30 April tahun 1977 Seri D Nomor 4.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan adalah untuk menunjang usaha-usaha pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana perlunya mengintensifkan pemungutan Pajak-pajak Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

2. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaa kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian perencanaan
 - 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi pajak
 - 2) Seksi pembukuan
 - 3) Seksi sengketa pajak dan doleansi.
- d. Bidang pendapatan lain-lain, membawahi:
 - 1) Seksi retribusi
 - 2) Seksi penerimaan pusat
 - 3) Seksi sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.
- e. Bidang Pengawasan Dan Pembinaan, membawahi:
 - 1) Seksi pengawasan keuangan dan personil
 - 2) Seksi pembinaan teknis administrasi
 - 3) Seksi pembinaan material
- f. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan PATDA,
membawahi:
 - 1) Seksi analisa sistem dan pengembangan informasi
 - 2) Seksi pengolahan pendapatan daerah
 - 3) Seksi hukum dan perundang-undangan

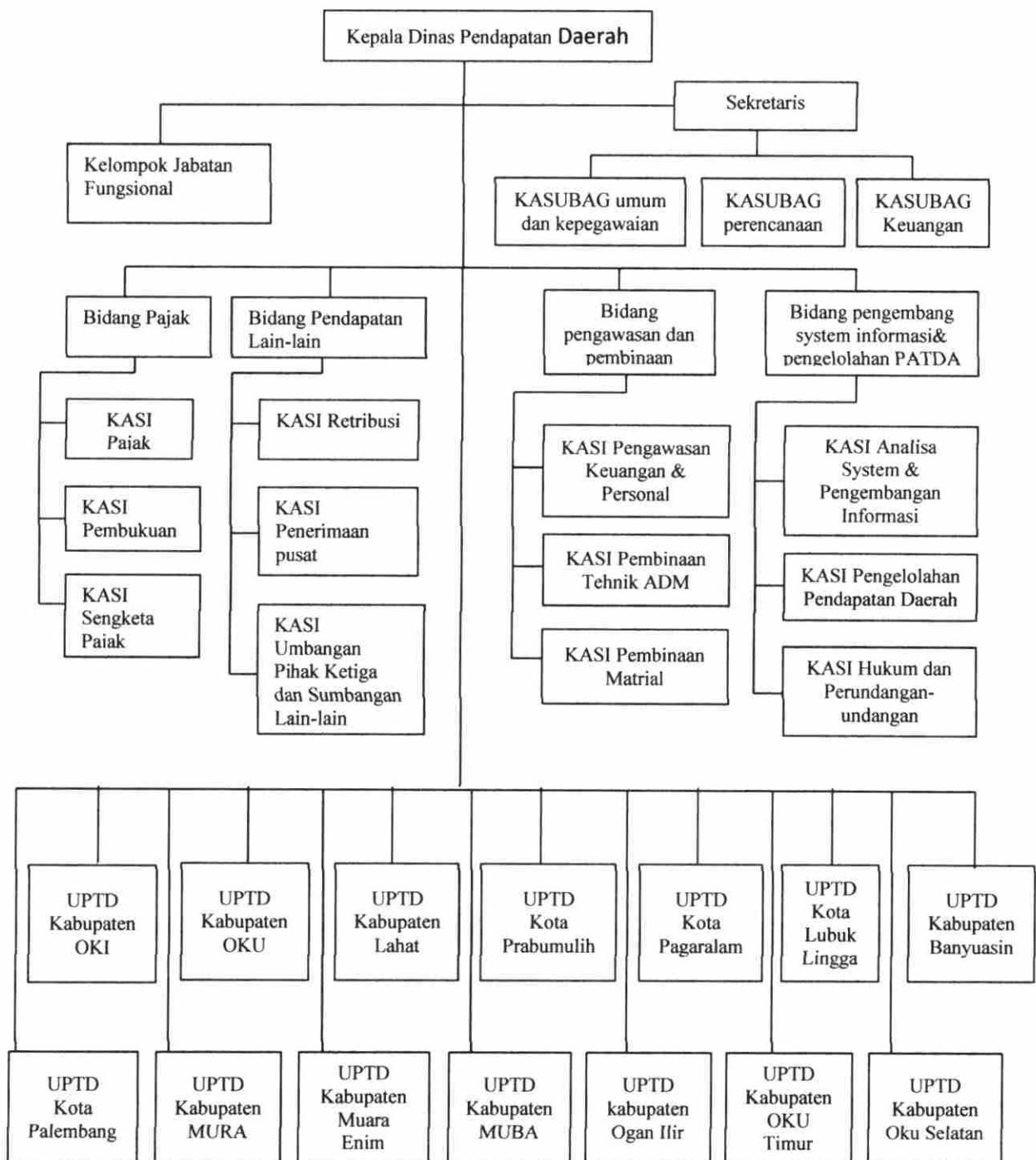
- g. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) terdiri dari 15 (lima belas) UPTD yang tersebar di Kabupaten / Kota.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Susunan kepegawaian

Pada periode bulan januari 2009 bazzeting pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 344 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pegawai pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 125 orang.
- b. Pegawai pada kantor-kantor unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) yang berada dikabupaten/kota.

5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

6. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didasarkan pada visi yaitu: “Pendapatan Asli Daerah Sebagai Potensi Utama Meningkatkan Dan Memeratakan Pembangunan Dengan Mengutamakan Pelayanan”.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1) Meningkatkan Pelayanan Secara Optimal

Pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian agar dengan pelayanan yang prima yang berupa *one day service* akan dapat menggugah wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

2) Meningkatkan Motivasi Masyarakat

Peran aktif masyarakat terhadap pembangunan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi dan lain-lain.

3) Meningkatkan Peran Aktif Dinas / Instansi Pemungut Pendapatan Daerah

Dinas/instansi pemungut diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban di bidang pendapatan daerah. Untuk itu senantiasa perlu dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah harus dapat ditingkatka agar keinginan yang terkandung di dalam visi dapat terwujud.

7. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya pelayanan prima
- 2) Terciptanya budaya masyarakat yang sadar membayar pajak dan retribusi
- 3) Terwujudnya koordinasi yang baik di antara dinas/instansi pemungutan pendapatan daerah
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan professional
- 5) Terwujudnya pendapatan daerah secara optimal.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan kualitas aparat pelayanan
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional

- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi pemungut pendapatan daerah
- 5) Peningkatan identifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

8. Analisis lingkungan internal dinas pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan (kekuatan dan kelemahan)

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan memiliki kekuatan untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah dan memiliki kelemahan yang dapat menghambat terealisasinya pendapatan tersebut secara maksimal. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diharapakan sejak dini dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan mampu mendayagunakan kekuatan untuk mengantisipasi berbagai kelemahan yang ada.

a. Kekuatan

Untuk merealisasikan penerimaan pendapatan daerah secara maksimal diperlukan adanya pendukung dari berbagai sektor antara lain sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dana
- 2) Tersedianya aparatur yang berkualitas
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana
- 4) Tersedianya program kerja periode 2009-2013
 - a) Adanya tim Pembina samsat
 - b) Penyuluhan pajak

b. Kelemahan

Dalam upaya merealisasikan pendapatan asli daerah secara maksimal, beberapa aspek internal turut menentukan untuk diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kemampuan aparatur
- 2) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak
- 4) Terbatasnya dana

9. Analisis lingkungan eksternal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

a. Peluang

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan untuk merealisasikan pendapatan asli daerah secara maksimal yaitu adanya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang
- 2) Adanya BUMN, BUMD, dan BUMS
- 3) Teknologi informasi dan komunikasi.

b. Ancaman

- 1) Krisis ekonomi global
- 2) Kurangnya penegakan supremasi hukum.

10. Data Yang Berhubungan Dengan Penelitian

Berikut ini tabel Target dan Realisasi Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012, 2013 dan 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel IV. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA)
Tahun 2012

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	16.467.521,00	17.985.109,50
Februari	16.787.121,00	19.989.909,50
Maret	17.987.654,00	20.943.809,80
April	20.064.654,00	16.005.941,50
Mei	18.098.434,00	18.905.849,80
Juni	17.912.890,00	21.098.549,80
Juli	15.009.867,00	15.087.689,00
Agustus	19.069.980,20	20.186.548,00
September	15.169.775,00	16.288.797,00
Oktober	18.168.976,00	19.231.909,00
November	18.780.098,00	17.649.654,00
Desember	17.482.629,80	16.022.876,40

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012.

Tabel IV. 2

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA)
Tahun 2013**

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	16.879.444,07	15.324.956,00
Februari	18.798.477,30	17.345.657,00
Maret	17.230.247,00	16.375.913,00
April	15.498.798,00	15.879.844,31
Mei	16.348.472,90	14.948.583,83
Juni	20.939.530,00	19.848.468,43
Juli	19.947.492,74	14.437.499,38
Agustus	17.219.342,00	16.093.732,00
September	12.829.928,00	16.739.847,00
Oktober	21.908.443,80	18.958.680,00
November	17.241.648,40	16.341.251,80
Desember	16.158.175,79	20.256.292,25

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Tabel IV. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA)
Tahun 2014

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	16.879.098,07	14.324.950,00
Februari	18.700.987,00	16.345.098,00
Maret	9.230.247,00	10.375.009,00
April	16.909.076,00	15.990.876,00
Mei	17.348.909,00	15.948.000,00
Juni	25.939.530,00	19.898.000,00
Juli	22.348.765,00	21.949.087,00
Agustus	17.990.000,00	14.097.632,00
September	17.002.890,00	16.098.432,90
Oktober	17.998.898,00	15.097.000,00
November	17.900.000,00	15.998.760,00
Desember	12.751.599,93	12.676.405,10

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

Tabel IV. 4
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA)
Tahun 2012

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	1.798.877,00	1.549.098,00
Februari	1.696.980,00	1.508.798,10
Maret	1.597.863,00	1.499.796,90
April	1.709.064,00	1.513.097,00
Mei	1.490.987,00	1.590.186,00
Juni	1.598.789,00	1.436.518,00
Juli	1.666.666,67	1.513.962,50
Agustus	1.806.643,00	1.765.854,00
September	1.407.783,00	1.365.908,00
Oktober	1.799.782,00	1.698.708,00
November	1.769.709,00	1.408.567,00
Desember	1.654.959,33	1.316.054,50

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2012.

Tabel IV. 5
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA)
Tahun 2013

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	2.456.687,00	1.965.479,00
Februari	3.509.478,00	2.014.255,00
Maret	3.494.821,00	2.039.987,00
April	2.387.899,00	2.076.676,50
Mei	1.498.767,00	2.038.563,64
Juni	2.396.489,00	2.086.439,00
Juli	1.497.689,00	2.028.499,55
Agustus	994.859,00	2.193.749,00
September	2.488.162,00	2.467.568,00
Oktober	3.368.584,00	2.026.476,00
November	3.484.592,00	2.083.493,00
Desember	2.421.973,00	1.567.969,31

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013.

Tabel IV. 6
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA)
Tahun 2014

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	1.409.809,00	1.965.400,00
Februari	3.598.786,00	2.914.098,00
Maret	1.994.800,00	1.039.987,00
April	1.906.656,00	2.965.999,00
Mei	2.498.767,00	1.030.097,00
Juni	2.696.000,00	2.386.400,00
Juli	3.190.857,00	3.037.547,00
Agustus	2.500.989,00	2.193.000,00
September	2.590.080,00	2.236.500,00
Oktober	2.598.798,00	2.001.099,00
November	2.620.000,00	2.193.000,00
Desember	2.424.449,00	1.309.773,00

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014.

Tabel IV. 7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2012

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	153.902.547.959,27	162.991.918.966,50
Februari	159.897.905.027,30	163.254.376.031,03
Maret	158.529.718.098,00	155.982.687.794,40
April	163.041.544.565,40	159.052.962.704,40
Mei	159.054.057.040,90	157.372.248.307,80
Juni	161.128.947.298,80	153.396.210.246,80
Juli	165.073.394.714,01	158.278.269.361,52
Agustus	165.737.463.703,60	167.100.495.333,50
September	154.639.421.176,00	158.108.906.182,00
Oktober	162.558.096.066,00	162.948.822.956,00
November	154.062.432.497,00	157.531.442.702,00
Desember	157.816.290.181,72	238.114.206.912,56

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2012.

Tabel IV. 8
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2013

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	197.492.633.201,78	167.168.614.348,26
Februari	181.082.641.938,70	165.674.043.402,54
Maret	191.018.803.331,32	151.490.456.866,52
April	177.267.546.200,79	161.106.466.674,44
Mei	192.158.657.215,68	170.132.876.929,28
Juni	172.747.378.900,25	160.313.277.394,67
Juli	189.748.707.019,75	168.872.629.967,40
Agustus	177.212.685.022,00	157.529.791.203,00
September	175.468.194.045,00	161.001.504.770,00
Oktober	181.625.022.515,80	162.293.253.775,66
November	200.638.103.004,40	175.257.701.197,59
Desember	177.959.872.604,53	220.856.170.745,74

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013.

Tabel IV. 9
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2014

Bulan	Target Penerimaan (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)
Januari	210.036.168.256,64	191.693.200.382,50
Februari	221.955.349.675,00	203.844.386.465,00
Maret	172.268.346.938,00	164.621.437.006,00
April	212.029.132.589,00	193.117.039.680,00
Mei	218.350.750.588,40	200.909.894.329,00
Juni	216.091.977.167,90	202.344.779.631,31
Juli	240.957.102.707,00	223.652.965.333,00
Agustus	216.739.532.148,00	192.570.565.087,00
September	214.841.831.971,00	197.094.891.670,90
Oktober	219.564.861.874,00	204.697.129.123,00
November	217.156.153.816,00	202.218.020.378,00
Desember	259.572.408.303,00	231.114.081.838,15

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014.

Setelah Penulis menjabarkan gambar umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta menganalisis data penerimaan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka berikut ini Penulis

akan membahas penelitian yang telah Penulis lakukan mengenai “ Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Uji asumsi klasik, Uji heteroskedastisitas, Uji autokolerasi, Uji multikolinearitas, Regresi linier berganda, Uji f dan Uji t.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*). Dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian Normalitas yaitu:

- Jika nilai probabilitas (*kolmogorov-smirnov*) > taraf signifikansi 5%, maka data terdistribusi dengan normal
- Jika nilai probabilitas (*kolmogorov-smirnov*) < taraf signifikansi 5%, maka data tidak terdistribusi dengan normal.

Berdasarkan hasil Uji normalitas data untuk item-item variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air

(X₂), dan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini.

Tabel IV.4
Test Of Normality

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	.12673571
Most Extreme Differences		Absolute	.220
		Positive	.220
		Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z			1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)			.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan hasil Uji normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov test* untuk nilai signifikan (sig) Asymp. sig. (2-tailed) Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pendapatan Asli Daerah adalah 0,062. Artinya bahwa pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) dan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini dinyatakan bahwa distribusi data adalah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

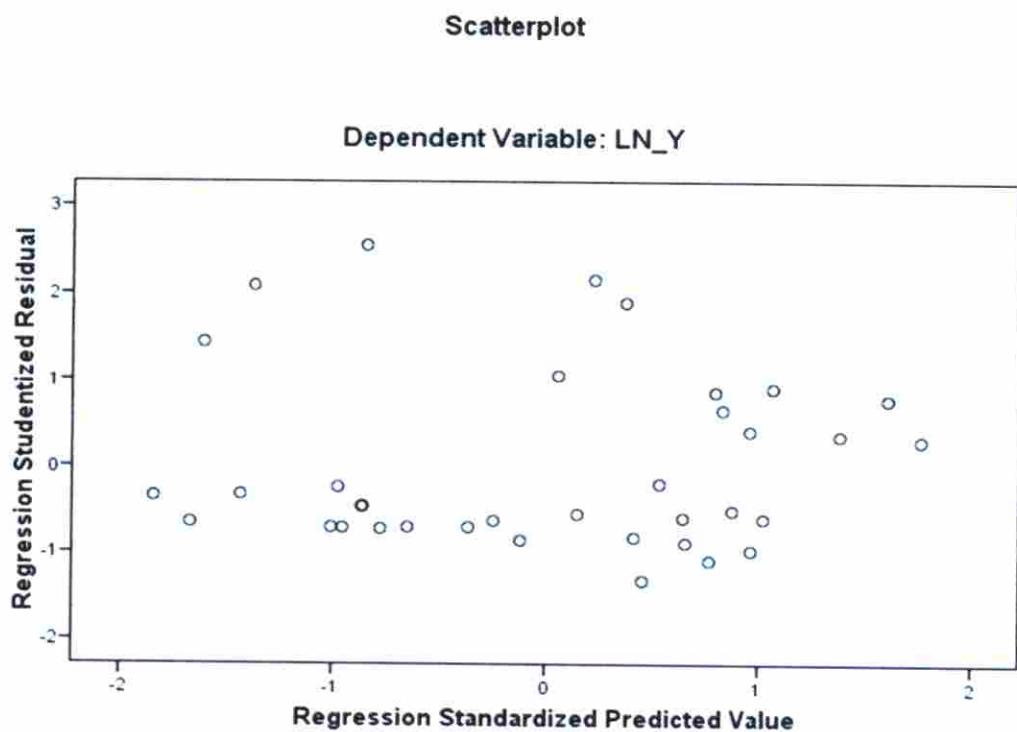
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Jika

varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heteroskedastisitas antara nilai prediksi variabel dependen dengan variabel independen.

Di bawah ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan Gambar VI.1 di atas, antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Pendapatan Asli Daerah.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autorelasi. Uji Durbin Watson yang hasilnya diperoleh sebagai berikut:

**Tabel IV.5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.219 ^a	.048	-.010	.13052	1.119

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai DW adalah 1.119 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autorelasi pada model peneliti ini.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Untuk mendeteksi apakah terjadi

multikolineritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* VIF. Tidak terjadi multikolineritas jika nilai *tolerance* lebih besar 0,10 dan terjadi multikolineritas jika nilai VIF lebih kecil 10,00 uji Multikolineritas, penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.6
Uji Multikolinearitas**

Coefficients ^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_PKAA	.963	1.038
	LN_BBN	.963	1.038

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas, menunjukkan output coefficient nilai VIF masing-masing variabel pada kolom output coefficients untuk variabel X₁ sebesar 1,038 dan variabel X₂ sebesar 1,038. Kedua nilai variabel lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

2. Analisis Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R Square)

Korelasi adalah koefisien yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut dapat secara korelasional dan dapat juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab-akibat maka korelasi tersebut

dikatakan korelasional, artinya sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kausal, artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat.

Koefisien determinasi adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan, artinya penyebab perubahan pada variabel Y disebabkan oleh variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik atau turunnya variabel lain (variabel Y).

**Tabel IV.7
Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R Square)**

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.219 ^a	.048	-.010	.13052

a. Predictors: (Constant), LN_BBN, LN_PKAA

b. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar = 0,219 yang berarti bahwa hubungan atau tingkat asosiasi variabel bebas yaitu PKAA dan BBN-KAA dengan variabel terikat yaitu PAD adalah cukup kuat.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih, variabel independen pendapatan asli

daerah (ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan *outcome*), dengan variabel dependen akuntabilitas publik. analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan.

Berikut ini dapat dilihat pada IV.8 yang menjelaskan hasil perhitungan Persamaan Regresi Berganda.

**Tabel IV.8
Regresi Berganda**

Coefficients ^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	26.781	2.494	
LN_PKAA	-.132	.145	-.157
LN_BBN	.091	.085	.186

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber: Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan Tabel VI.8 hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1), Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, berpengaruh positive terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat di gambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 26,781 - 0,132X_1 - 0,091X_2$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Kostanta sebesar 26,781 menyatakan bahwa jika variabel bebas PKAA dan BBN-KAA dianggap 0, maka PAD adalah 26,781.

b) Koefisien regresi b_1 memiliki arti bahwa jika variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,132.

c) Koefisien regresi b_2 memiliki arti bahwa jika variabel Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,091.

Artinya koefisien regresi b_1 memiliki arti bahwa jika variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), jadi semakin tinggi Variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (Y), atau semakin rendah Variabel Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) maka semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan Koefisien b_2 memiliki arti bahwa jika variabel Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya variabel Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (X_2) memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), jadi semakin tinggi variabel Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (X_2) maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (Y), atau semakin rendah variabel Bea Balik

Nama Kendaraan di atas Air (X_2) maka semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah (Y).

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji signifikasi, untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara signifikasi mempengaruhi variabel tidak bebas baik secara simultan maupun parsial.

a. Uji f (Uji Bersama-sama)

Pengujian hipotesis Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji F ini menguji apakah Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air berpengaruh signifikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H_a : adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hipotesis statistik di atas dapat di artikan bahwa H_0 menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas, dan H_a menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Menguji hipotesis tersebut menggunakan uji statistik F, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan kriteria keputusan:

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$: H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: H_0 ditolak dan H_a diterima

Berikut ini adalah tabel hasil uji F (bersama-sama) yang di peroleh dengan menggunakan *software* SPSS.

**Tabel IV.9
Uji f**

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.028	2	.014	.833	.444 ^a
Residual	.562	33	.017		
Total	.591	35			

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Hasil Pemgelola Data 2015

Berdasarkan Tabel di atas, dapat di lihat bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 0,833 lebih kecil dari F_{tabel} 3,28, hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,444 atau signifikansi yang diperoleh lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 diterima, H_a ditolak.

Artinya bahwa pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual alam menerangkan variasi variabel terikat (Sugiyono, 2008 :244).

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air.

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H_a : adanya pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kriteria penelitian :

- 1) Jika $\text{sig } t / >a(0,05)$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti ada pengaruh yang signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $\text{sig } t / <a(0,05)$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil uji statistik t merupakan suatu bentuk analisis parsial untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji t berguna untuk mengetahui apakah secara individual variabel (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi (Y) atau tidak.

Besarnya koefisien korelasi parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel ini:

Tabel IV.10
Uji t

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.781	2.494		.000		
	LN_PKAA	-.132	.145	-.157	-.907	.371	.963
	LN_BBN	.091	.085	.186	1.075	.290	.963
							1.038

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber : Hasil Pengelola Data 2015

Berdasarkan Tabel diatas hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar -0,132 dengan nilai sig $0,371 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,907 < t_{tabel} 2,035$.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa:

- a) PKAA (X1) mempunyai hubungan negatif atau tidak searah, hal ini berarti bila PKAA diturunkan, maka PAD juga menurun. Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif yaitu sebesar -0,132 dengan nilai sig $0,371 > 0,05$ dan nilai

$t_{hitung} -0,907 < t_{tabel} 2,035$. Maka dapat disimpulkan bahwa PKAA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

- b) BBN-KAA (X_2) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti bila BBN-KAA ditingkatkan, maka PAD juga meningkat, dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,091 dengan nilai sig 0,290 > 0,05 dan nilai $t_{hitung} 1,075 < t_{tabel} 2,035$. Maka dapat disimpulkan bahwa BBN-KAA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air (X_1) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (X_2) secara simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Hasil uji analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan yang kuat pada pengaruh variabel pajak kendaraan di atas air (X_1), bea balik nama kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini berdasarkan hasil uji F pada tabel diperoleh F_{hitung} sebesar 0,833 lebih kecil dari dari $F_{tabel} 3,28$, hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,444 atau signifikansi yang diperoleh lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 diterima, H_a ditolak.

Kesimpulan ini dikaitkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak

kendaraan di atas air dan bea balik kendaraan di atas air sehingga penerimaan pembayaran menjadi tidak normal. Menyadari akan pentinya membayar pajak daerah, mengingat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang di aliri sungai yaitu sungai musi. Seharusnya Dinas Pendapatan Asli Daerah lebih meningkatkan lagi pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air untuk tahun berikutnya melebihi sekarang, karena dengan meningkatkan pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air dapat membuat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan dari hasil analisis uji statistik dalam penelitian ini, ternyata tingginya Pendapatan Asli daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tidak dipengaruhi oleh pajak kendaraan di atas air secara signifikan. Karena nilai t_{hitung} -0,097 juga lebih kecil dari pada t_{tabel} 2,035 , maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan di atas air tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah. Masyarakat kurang patuh dalam membayar pajak daerah

karena menganggap pajak daerah memberatkan mereka, terutama pembayaran pajak kendaraan di atas air dan belum adanya sanksi hukum terhadap pajak daerah, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga terjadinya penerimaan pajak kendaraan di atas air yang kurang normal. Selama ini pajak kendaraan di atas air dipungut karena kendaraan yang dimiliki seseorang di daftarkan sebagai kendaraan yang terdaftar di Dinas Perhubungan melalui spesifikasi tertentu untuk mendapatkan surat izin serang dan bukti kepemilikan kendaraan di atas air. Bukti kepemilikan kendaraan di atas air itu sendiri digunakan sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan di atas air tersebut telah di daftarkan di Dinas Perhubungan dan surat izin serang adalah surat izin beroperasinya kendaraan di sungai. Jika seseorang memiliki surat izin serang dan bukti kepemilikan kendaraan di atas air maka secara otomatis atas kendaraan di atas air tersebut juga membayar pajak kendaraan di atas air. Pegawai yang melakukan penarikan pajak juga mengeluhkan sulitnya menarik pajak daerah. Upaya yang dilakukan oleh pegawai dengan menjemput konsumen masih kurang efektif karena kesadaran masyarakat masih kurang.

3. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh variabel bea balik nama kendaraan di atas air (X_2) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti bila bea balik nama kendaraan di atas air (X_2) ditingkatkan, maka pendapatan asli daerah (Y) juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 1,075 lebih kecil dari t_{tabel} 2,035 , maka dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan di atas Air (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengumutan pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air dikarenakan pemilik kendaraan yang belum terdaftar sama sekali. Pemilik kendaraan di atas air yang belum terdaftar mengatakan bahwa alasan utamanya adalah ketidaktahuan pemilik kendaraan di atas air akan adanya pemungutan pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan di atas air dan baru memiliki kendaraanya tersebut. Pemilik kendaraan yang rata-rata tinggal di pusat Kota Palembang banyak yang tidak mengetahui tentang adanya pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi langsung dari petugas.

Berkaitan dengan hasil penelitian Dwi tahun 2013 yang telah diuraikan pada bab kajian pustaka sebelumnya, dengan hasil penelitian yaitu tingkat pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara untuk penelitian ini, tingkat pengaruh Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, mungkin saja ada faktor-faktor lain yang lebih utama dalam mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan, dibandingkan dengan faktor Pajak Kendaraan di atas air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Tentu saja hal ini bisa menjadi rekomendasi sebagai bahan kajian ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji analisis statistik secara silmultan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan yang kuat pada pengaruh variabel pajak kendaraan di atas air (X_1), bea balik nama kendaraan di atas air terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini berdasarkan hasil uji F pada tabel diperoleh F_{hitung} sebesar 0,833 lebih kecil dari dari F_{tabel} 3,28, hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,444 atau signifikansi yang diperoleh lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 diterima, H_a ditolak.
2. Hasil uji analisis statistik secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan PKAA (X_1) mempunyai hubungan negatif atau tidak searah, hal ini berarti bila PKAA diturunkan, maka PAD juga menurun. Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif yaitu sebesar -0,132 dengan nilai sig 0,371 > 0,05 dan nilai t_{hitung} -0,907 < t_{tabel} 2,035. Maka dapat disimpulkan bahwa PKAA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. dan untuk BBN-KAA (X_2) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti bila BBN-KAA ditingkatkan, maka PAD juga meningkat, dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif

yaitu sebesar 0,091 dengan nilai sig 0,290 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,075 < t_{tabel} 2,035. Maka dapat disimpulkan bahwa BBN-KAA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih meningkatkan lagi Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) untuk tahun berikutnya melebihi sekarang, karena dengan meningkatkan Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) dapat membuat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bukan hanya dari Pajak Kendaraan di atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KAA) saja, melainkan pajak daerah lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, Penelitian ini hanya tertuju pada satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.** Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2008. **Perpajakan Indonesia. Edisi kedelapan. Buku satu.** Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Dwi Puspita Sari. 2013. **Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Serpong-DPKA Provinsi Banten.** Skripsi Universitas Pelita Harapan Banten.
- Harry Purwono. 2010. **Dasar – Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak.** Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marihot. P. Siahaan. 2008. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marihot. P. Siahaan. 2010 **Pajak Daerah dan retribusi Daerah,** PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan. Edisi Revisi 2009,** Yogyakarta, Penerbit Andi Grafindo, Jakarta.
- Sendhy Saputra. 2014. **Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Diatas Air terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kepulauan Riau.** Skripsi Universitas Batam.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pendapatan Asli Daerah.**

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 - 2014**



No.	URAJAN	2010		2011		2012	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	1.363.164.446.550,00	1.369.935.856.700,26	1.687.295.615.400,00	1.829.119.912.016,18	1.907.709.087.876,00	2.001.714.883.941.671,00
A.	PAJAK DAERAH	1.201.614.751.900,00	1.226.712.568.519,00	1.513.311.745.000,00	1.671.518.571.861,25	1.731.326.700.000,00	1.803.318.869.283,00
PKB	402.981.200.000,00	410.534.369.881,00	489.243.745.000,00	508.202.999.912,00	577.307.600.000,00	594.502.475.946,00	
PKAA	-	-	-	-	-	-	
BBN-KB	210.831.900,00	199.076.950,00	211.000.000,00	191.950.125,00	211.000.000,00	219.647.550,00	
BBN-KB	423.386.700.000,00	515.296.194.435,00	614.757.600.000,00	781.649.668.321,00	743.709.100.000,00	753.808.310.196,00	
PBB-KB	20.000.000,00	18.420.400,00	20.000.000,00	24.011.100,00	20.000.000,00	18.167.550,00	
P3ABT	370.516.000.000,00	295.156.403.880,00	405.079.000.000,00	375.173.930.914,80	405.079.000.000,00	447.508.443.100,00	
P3AP	500.000.000,00	158.611.597,00	67.487.385,00	-	-	-	
PKB Alai Berat	4.000.000.000,00	3.858.121.593,00	4.000.000.000,00	4.733.870.790,45	5.000.000.000,00	6.017.839.107,00	
BBN-KB Alai Berat	-	1.042.105.915,00	-	1.280.281.391,00	-	957.515.184,00	
Pajak Rokok	-	449.243.868,00	-	194.391.752,00	-	786.416.560,00	
B.	RETRIBUSI DAERAH	16.876.342.650,00	17.472.278.621,05	13.133.650.000,00	11.682.781.660,11	16.958.740.500,00	13.332.878.781,45
RPK	5.246.460.000,00	6.023.965.950,00	-	130.475.000,00	-	-	
Retribusi Lainnya	11.629.662.650,00	11.723.312.571,05	13.133.650.000,00	11.552.306.650,11	15.958.740.500,00	13.332.878.781,45	
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.297.374.000,00	62.608.133.112,90	73.136.000.000,00	78.958.547.984,99	87.969.000.000,00	85.892.644.193,47
D.	Lain-lain PAD Yang Sah	85.376.000.000,00	62.869.886.547,31	87.714.820.400,00	86.962.010.699,83	72.454.641.176,00	88.670.211.283,69
II.	BAKAN DAN PERINBANGAN	1.797.286.216.801,00	1.823.059.236.629,00	1.988.938.313.000,00	1.992.557.000.412,00	2.240.011.913.025,00	2.378.798.650.801,00
A.	BAGI HASIL PAJAK	339.267.441.527,00	431.004.934.912,00	387.224.072.000,00	376.632.688.614,00	429.284.888.075,00	490.241.628.883,00
PBB	231.212.091.520,00	284.124.031.342,00	277.903.847.500,00	289.270.532.318,00	297.401.741.156,00	343.553.987.656,00	
BPHITB	16.596.197.231,00	60.922.443.546,00	-	532.000,00	-	-	
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Psi. 21)	90.918.454.158,00	85.275.995.480,00	108.771.283.000,00	90.349.570.421,00	130.856.009.414,00	145.460.936.576,00	
Cukai Hasil Tembakau	530.698.618,00	612.371.544,00	548.941.500,00	11.865.875,00	1.026.935.505,00	1.226.705.651,00	
B.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	922.202.398.274,00	862.193.717.717,00	922.613.840.000,00	833.824.102.788,00	1.049.172.535.950,00	1.127.002.339.918,00
IHH/PSDH	3.134.130.701,00	985.387.878,00	4.088.593.000,00	4.102.790.266,00	2.965.454.855,00	6.594.423.797,00	
Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	-	-	-	-	2.312.960,00	693.888,00	
Landrent	1.396.743.800,00	1.709.556.793,00	3.423.080.000,00	3.107.542.631,00	2.318.378.247,00	4.599.817.979,00	
Iuran Explorasi (Royalty)	51.427.392.900,00	79.418.210.862,00	66.315.169.400,00	120.627.357.477,00	100.915.861.573,00	137.727.404.097,00	
Minyak Burni	251.661.682.730,00	244.318.029.778,00	239.059.182.700,00	243.954.262,00	301.867.315.470,00	282.184.157.400,00	
Gas Alam	614.562.448.143,00	535.752.532.406,00	609.727.914.900,00	562.031.977.162,00	641.103.212.845,00	695.895.832.757,00	
C.	DANA ALOKASI UMUM	612.083.577.000,00	612.083.577.000,00	646.813.301.000,00	646.813.301.000,00	716.163.261.000,00	716.163.261.000,00
D.	DANA ALOKASI KHUSUS	23.424.800.000,00	17.807.100.000,00	32.287.000.000,00	32.287.000.000,00	45.401.430.000,00	45.401.430.000,00
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.258.187.342,00	29.693.713.804,00	12.444.773.000,00	12.308.053.733,00	881.021.108.677,00	843.426.339.966,00
Pendapatan Hibah	11.411.946.000,00	12.090.225.200,00	12.191.600.000,00	22.054.880.733,00	20.352.900.000,00	20.509.442.386,00	
Dana Tambahan Pengisu Gunung Pinang	639.600.000,00	639.000.000,00	-	-	687.000.000,00	687.000.000,00	
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	1.000.000.000,00	-	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	-	-	
Dana Insentif Daerah	-	-	24.250.923.000,00	24.250.923.000,00	671.250.000,00	-	
Dana tunjangan Kependidikan	-	-	671.250.000,00	671.250.000,00	-	-	
Dana BOS	-	-	-	-	-	-	
Sisa Dana Panitia Sea Games	-	-	61.831.000.000,00	61.831.000.000,00	814.067.820.000,00	777.088.050.000,00	
Pengembalian Sisa Dana KONI	-	-	-	-	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	
Dana Hibah WISMP-2	-	-	-	-	5.059.388.677,00	5.142.347.580,00	
Dana Pengurusan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	37.476.641.342,00	16.864.488.604,00	-	-	814.000.000,00	-	
Piutang dana Jamsoskokes kab.Kota	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	3.210.708.852.693,00	3.222.588.807.133,26	3.788.678.701.400,00	3.963.884.866.161,18	5.028.742.103.378,00	5.223.940.074.318,61	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 - 2014**

No.	URAIAN	2013		2014	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	2.214.420.245.000,00	2.021.696.787.275,10	2.595.724.088.303,00	2.407.918.390.123.768
A.	PAJAK DAERAH	1.889.720.400.000,00	1.882.698.915.840,00	2.426.320.400.000,00	2.287.778.726.033,50
PKB	-	663.700.000,00	663.422.958.000,00	812.902.152.908,00	749.161.671.04,00
PKAA	-	211.000.000,00	202.550.725,00	211.000.000,00	188.991.59,00
BBN-KB	-	870.496.700.000,00	704.501.493.444,00	870.285.507.745,00	686.782.045.750,00
BBN-KAA	-	30.000.000,00	24.589.155,00	30.000.000,00	25.464.906,00
PBB-KB	-	460.079.000.000,00	508.333.162.553,00	473.079.000.000,00	591.598.965.532,00
P3ABT	-	-	-	-	-
P3AP	-	5.000.000.000,00	5.124.607.040,00	5.000.000.000,00	5.616.525.075,50
PKB Alat Berat	-	-	871.243.600,00	1.001.541.092,00	1.382.893.447,00
BBN-KB Alat Berat	-	-	116.310.525,00	211.192.255,00	1.366.901.293,00
Pajak Rokok	-	-	-	260.600.000,00	237.608.496.557,00
B.	RETRIBUSI DAERAH	16.771.980.000,00	16.522.286.308,00	13.141.360.500,00	11.457.554.354,00
RPK	-	-	-	-	-
Retribusi Lainnya	-	16.771.950.000,00	16.522.296.308,00	-	-
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	92.835.600.000,00	69.352.788.749,12	49.508.322.803,00	30.618.098.292,35
D.	Lain-Lain PAD Yang Sah	104.992.386.000,00	63.224.806.577,98	107.754.005.000,00	98.063.012.243,81
II.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	2.951.325.643.000,00	2.649.216.454.338,00	3.056.056.793.031,00	2.982.866.000.798,00
A.	BAGI HASIL PAJAK	569.364.334.000,00	572.654.633.976,00	497.915.041.590,00	548.870.331.198,00
PBB	-	401.842.663.500,00	437.487.000.115,00	322.331.652.100,00	403.772.228.167,00
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Psi 21)	-	166.268.116.500,00	133.559.727.861,00	173.865.534.315,00	144.321.923.565,00
Cukai Hasil Tembakau	-	1.253.554.000,00	1.607.905.999,00	1.717.855.175,00	776.179.466,00
B.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	1.488.268.112.000,00	1.180.886.063.363,00	1.809.844.081.441,00	1.385.698.009.800,00
IHH/PSDH	-	3.839.701.900,00	2.268.620.941,00	11.423.956.505,00	301.565.568,00
Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	-	3.010.000,00	-	-	7.996.769.533,00
Landfill	-	4.604.303.856,00	4.309.454.372,00	13.733.832.736,00	10.670.011.578,00
Iuran Exploras (Royalty)	-	183.154.669.984,00	124.286.386.568,00	287.314.773.600,00	209.143.920.788,00
Minyak Bumi	-	313.155.998.250,00	251.674.278.641,00	254.287.995.000,00	295.516.165.340,00
Gas Alam	-	981.499.428.000,00	798.227.912.841,00	943.083.533.600,00	862.069.556.773,00
C.	DANA ALOKASI UMUM	870.516.767.000,00	870.516.767.000,00	985.542.760.000,00	985.542.760.000,00
D.	DANA ALOKASI KHUSUS	25.188.400.000,00	25.188.400.000,00	62.754.900.000,00	62.754.900.000,00
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	835.036.880.000,00	797.226.449.420,00	826.924.664.230,65	846.598.522.953,65
Pendapatan Hibah	-	21.250.900.000,00	20.463.247.986,00	4.755.110.661,00	20.248.944.364,00
Dana Tambahan Penghsl. Guru PNNSD 2010	-	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00	534.000.000,00
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
Dana Tunjangan Kependidikan	-	-	-	-	-
Dana BOS	-	-	-	-	-
Sisa Dana Panitia Sea Games	-	812.555.450.000,00	775.926.524.654,00	805.514.020.000,00	809.938.015.000,00
Pengembalian Sisa Dana KONI	-	-	-	-	-
Dana Hibah WISMP-2	-	448.530.000,00	56.676.800,00	-	-
Dana Penguratan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Jamsoskies kab.Kota	-	-	-	-	-
Putang dana shering Jamsoskies kab.Kota	-	-	-	15.875.523.569,65	15.875.523.569,65



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN_PKAA	LN_BBN	LN_PAD
N		36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16.6359	14.4212	25.9002
	Std. Deviation	.15453	.26519	.12989
Most Extreme Differences	Absolute	.119	.160	.233
	Positive	.119	.092	.233
	Negative	-.110	-.160	-.136
Kolmogorov-Smirnov Z		.712	.958	1.399
Asymp. Sig. (2-tailed)		.691	.317	.040

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12673571
Most Extreme Differences	Absolute	.220
	Positive	.220
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.219 ^a	.048	-.010	.13052	1.119

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.219 ^a	.048	-.010	.13052

a. Predictors: (Constant), LN_BBN, LN_PKAA

b. Dependent Variable: LN_PAD

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.028	2	.014	.833	.444 ^a
Residual	.562	33	.017		
Total	.591	35			

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	26.781	2.494		10.740	.000		
LN_PKAA	-.132	.145	-.157	-.907	.371	.963	1.038
LN_BBN	.091	.085	.186	1.075	.290	.963	1.038

a. Dependent Variable: LN_PAD

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 LN_PKAA	.963	1.038
LN_BBN	.963	1.038

a. Dependent Variable: LN_PAD

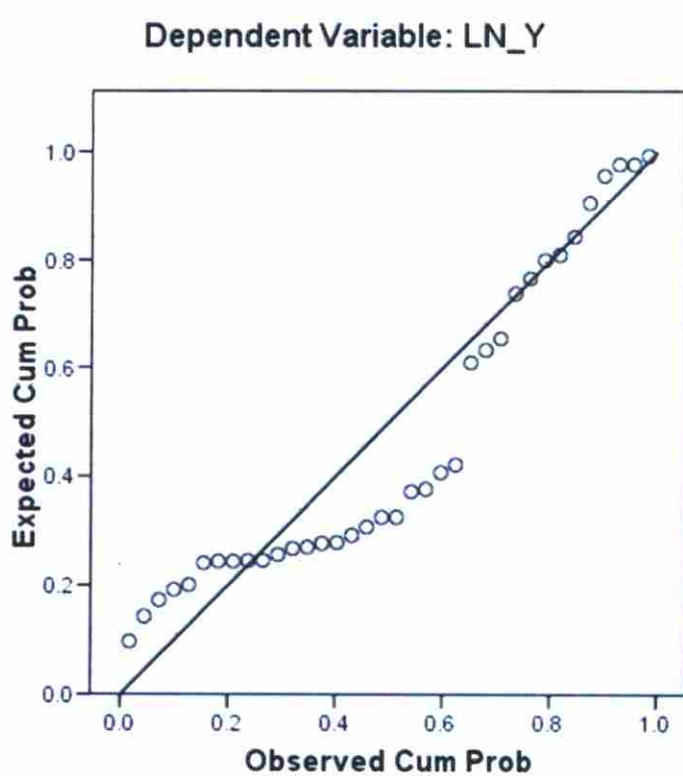
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	26.781	2.494	
LN_PKAA	-.132	.145	-.157
LN_BBN	.091	.085	.186

a. Dependent Variable: LN_PAD

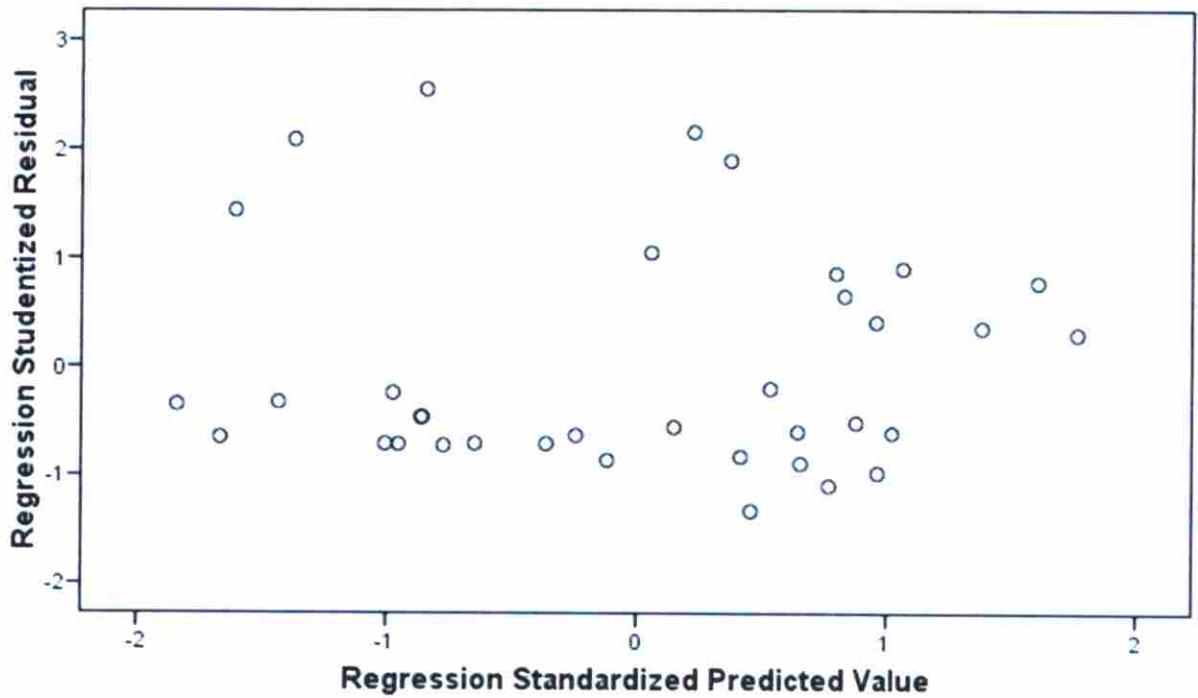
Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: LN_Y



Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS - PALEMBANG - KODE POS 30137
TELEPON (0711) 310633, 355107 FAX (0711) 319819
website : dispenda.sumselprov.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 224 Tahun 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	FAUZIAH
NIM	:	222011287
Fakultas	:	AKUNTANSI
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Telah melaksanakan Penelitian dan Riset pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015, sesuai surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor : 423.4/I/000346/Penda tanggal 09 Juni 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 28 Desember 2015

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS,



H. ZAINUDDIN ISMAIL, M.M.
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 195904131979071001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami



DIBERIKAN KEPADA :

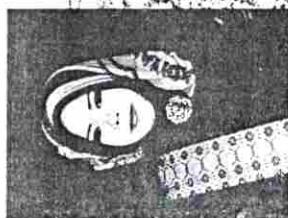
NAMA : FAUZIAH
NIM : 222011287
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (17) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

پسندیده
Palembang, 30/١٠/٢٠١٣
an. Dekan

Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jl. Ahmad Yani KM 13 Ulu Palembang 30203

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

E-mail. lembagabahasa@unimed.ac.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Fauziah
Place/Date of Birth	:	October, 13th 1992
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	July 26th, 2015
<u>Scaled Score</u>		
Listening Comprehension	:	41
Structure Grammar	:	37
Reading Comprehension	:	45
OVERALL SCORE	:	410

Palembang, July 26th, 2015
Head of Language Institute

Rosyfiti

Rini Susanti, S.Pd., M.A

NIBM/NIDN 1164932/0210098402

No. 168/TEA.FMLB/UMP/VII/2015

Centrales
123



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

جامعة محمدية الباريس

جامعة محمدية الباريس

No.509/H-4/LPKKN/UJP/I/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Fauziah
Nomor Pokok Mahasiswa : 222011287
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 13-10-1992
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Karya Mulia
Kecamatan : Sematang Borang
Kota/Kabupaten : Palembang
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui
Dekan

H. M. Idris, S.E., M.Si.



Ir. Alhamannasir, M.Si.



بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NA MAHASISWA : Fauziah	PEMBIMBING
M : 22 2011 287	KETUA Ida Zuraidah, Hj, S.E, Ak., M.Si
ROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
DUL SKRIPSI :	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air (BBN-KAA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	28 Agustus 2015	BAB I			Perbaik.
2	2 Sept 2015	BAB I 2			Tambahkan.
3	15 Sept 2015	BAB II			Ace. BAB II
4	7 Oktober 2015	BAB III			Perbaik.
5	22 Oktober 2015	BAB IV			Ace. BAB III, Sarut.
6	29 November 2015	BAB V			Perbaik.
7	2 Des 2015	BAB VI			Perbaik.
8	10 Des 2015	BAB VII			Perbaik.
9	18 Des 2015	BAB VIII			Perbaik.
10	20 Des 2015	BAB IX			Perbaik.
11	25 Des 2015	BAB X			Ace.
12	27 Des 2015	BAB XI			Perbaik.
13	31 Des 2015	BAB XII			Ace.
14					
15					
16					

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal
a.n. Dekan

Program Studi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

e: umpalembang.net/feump

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

Email : feumplg@gmail.co.t

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Januari 2016
 Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
 Nama : Fauziah
 NIM : 22 2011 287
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Ida Zuraidah, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	29/1-2016	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	3/2 - 2016	
3	Hj. Ida Zuraidah, S.E, Ak., M.Si	Penguji 1	29/1-2016	
4	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji 2	29/1/2016	

Palembang, Januari 2016

Dekan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si

NIK/NB.M : 0228115802/1021960

Biodata Penulis

Nama : Fauziah
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Oktober 1992
Agama : Islam
Hobby : Nonton, wisata kuliner
Alamat : Jl. Iswayudi Rt 17 Rw 04 Perumahan Puri Agung Mas Blok C1
Sekojo Palembang
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Kendaraan di atas air dan Bea Balik Nama
Kendaraan di atas Air Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas
Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan
Pembimbing : Hj. Ida Zuraidah, S.E,Ak.,M.Si
Riwayat Pendidikan : SDN 251 Palembang lulus tahun 2004
SMP 29 Palembang lulus tahun 2007
SMK N 1 Palembang lulu tahun 2010
Univ. Muhammadiyah Palembang lulus tahun 2016

Palembang, Januari 2016

Fauziah